

**IMPLEMENTASI ELEKTRONIK PEMILIHAN KEPALA DESA (E-PILKADES) OLEH DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK  
(Studi di Desa Panjunan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik)**

**Arjuna Dwi Amarta Putra**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[arjunadwi11@gmail.com](mailto:arjunadwi11@gmail.com)

**Fitrotun Niswah, S.AP, M.AP.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[Vita.unesa@yahoo.co.id](mailto:Vita.unesa@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Implementasi kebijakan *e-Government* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 5 Desa di Kabupaten Gresik merupakan tindakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam menindaklanjuti munculnya data ganda pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa, untuk mengantisipasi kecurangan dengan menyalahgunakan data ganda tersebut. Sehingga dapat mencapai tujuan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang teratur, bebas dan adil. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Implementasi Elektronik Pemilihan Kepala Desa (E-pilkades) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik di Desa Panjunan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber penelitian ini terdiri dari Ketua dan staff Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, perangkat Desa Panjunan, warga Desa Panjunan, panitia pelaksanaan pemilihan kepala Desa Panjunan. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan indikator Aspek-aspek dalam implementasi *e-Government* untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43) antara lain Perangkat Keras (*Hardware*), Perangkat Lunak (*Software*), *Human Resources* (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan E-Pilkades cukup direspon dengan baik oleh masyarakat Desa Panjunan, infrastruktur yang diberikan dari segi *hardware* masih banyak permasalahan yang muncul. *Software* yang digunakan dapat berjalan dengan baik. SDM yang ada tidak berdasarkan latar belakang pendidikan, tetapi hal tersebut dapat diatasi oleh Dispendukcapil Kabupaten Gresik. Selain itu Sikap pelaksana yang diberikan oleh operator pelaksanaan E-Pilkades merupakan yang terbaik dalam melayani masyarakat, dan telah direspon baik oleh masyarakat Desa Panjunan yang menggunakan program E-Pilkades.

**Kata Kunci:** Implementasi, *E-Government*, E-Pilkades

**Abstract**

Implementation of e-Government policy in the implementation of Village Head Election in 5 Villages in Gresik Regency is an action of Gresik Regency government in following up the emergence of double data on the implementation of village head election to anticipate cheating by misusing the double data. So as to be able to achieve the goal of conducting regular, free and fair village head elections. This research describes how Electronic Implementation of Village Head Election (E-Pilkades) by the Department of Population and Civil Registry of Gresik Regency in Panjunan Village, Sampeyan Sub-District, Gresik Regency. The research method used is descriptive with qualitative approach. The resource persons of this research consist of Chairman and staff of Cooperation and Innovation of Service Department of Population and Civil Registration of Gresik Regency, Panjunan Village Device, Panjunan Village Residents, Panjunan Village Head Election Committee. The analysis done in this research use indicator Aspects in e-Government implementation to realize better service according to Rianto and Lestari (2012: 43) such as Hardware, Software, Human Resources (SDM) , Data and Information, Organizational Structure, Communication, and Implementing Attitude. Data collection techniques in this study through

interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing. The results show that the implementation of E-Pilkades policy is quite well responded by the people of Panjunan Village, the infrastructure provided in terms of hardware is still a lot of problems that arise. Software used can run well. The existing human resources are not based on educational background, but they can be solved by Department of Population and Civil Registry of Gresik Regency. In addition, the implementation attitude given by the operators of the implementation of E-Pilkades is the best in serving the community, and has been responded well by the people of Panjunan Village who use the E-Pilkades program.

**Keywords: Implementation, E-Government, E-Pilkades**

## PENDAHULUAN

Teknologi informasi saat ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat modern. Tidak dapat dipungkiri lagi bila peran teknologi kini telah menjadi bagian utuh dengan manusia. Banyak produk teknologi informasi kini semakin mempermudah pekerjaan manusia, utamanya memberikan optimalisasi dan mempercepat kegiatan manusia dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Kelebihan lain dari kemajuan teknologi informasi ini yaitu teknologi informasi dapat memberikan informasi yang sangat cepat dan akurat. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan mengenalkan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat, diharapkan masyarakat akan lebih antusias dalam mengenal dan memanfaatkan teknologi informasi. Sebuah produk informasi yang baik diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan tugasnya serta dapat menggantikan proses dari manual ke proses semi otomatis. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam bagian menimbang butir (b) dinyatakan bahwa:

“membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.”

Dalam peningkatan pelayanan publik pemerintah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan organisasinya dengan baik. Hal ini tentu menjadi harapan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi ini dapat meningkatkan efisiensi serta efektifitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data baik data keuangan maupun data pemerintah lainnya, juga dalam mengaksesnya dan penggunaan informasi pemerintah yang besar secara akurat dan dalam rangka mewujudkan transparansi, meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan dapat meningkatkan partisipasi publik. Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan pemerintah sering dikenal dengan istilah elektronik government (*e-government*). Dalam Keppres Nomor 20 Tahun 2006 *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan pelaksanaan *e-government* di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Melalui hal tersebut *e-government* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Sehingga seluruh lembaga pemerintahan, masyarakat, dan pengusaha dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan pelayanan pemerintah secara optimal. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan penataan dalam sistem manajemen dan proses kerja dengan pengoptimalisasian pemanfaatan teknologi informasi ini dalam lingkungan pemerintah.

Dengan adanya penerapan *e-government* pada lingkungan pemerintah, pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah seiring dengan kemajuan internet yang pesat, sangat mungkin meninggalkan prosedur lama yang terkesan kaku dan masih berbasis tatap muka. Dengan *e-government* masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan pemerintah dapat menikmati pelayanan yang baik karena pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Dalam INPRES Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* membuat pemerintah harus menyelenggarakan *e-government* di berbagai lembaga pemerintahan. Dengan kata lain tidak ada batasan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi karena setiap masyarakat pasti menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah, tak terkecuali dengan masyarakat desa. Di jaman modern ini pelayanan pemerintah dari pusat hingga desa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta transparan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik) maka dari itu untuk mewujudkan transparansi pada pelayanan pemerintah perlu adanya pemerataan pelayanan berbasis elektronik dari pemerintahan pusat hingga desa.

Pemerintahan desa saat ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan wilayah desa, terutama setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa setiap 6 tahun sekali. Dengan terbitnya Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa ini dapat menjadi dasar hukum

pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan Pemilihan Kepala Desa di daerahnya secara berbarengan ataupun bergelombang mulai tahun 2015. Selain itu pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa dan jumlah penduduk. Alokasi Dana Desa tentu memberikan pemasukan yang besar. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa yang diatur dalam Permen No 113 tahun 2014.

Adanya APBDesa memberikan harapan yang semakin besar akan terwujudnya pembangunan yang lebih merata, adil dan melibatkan partisipasi masyarakat. Penggunaan APBDesa menjadikan perubahan yang sangat signifikan, desa yang dulu hanya mendapatkan anggaran yang sangat terbatas untuk dikelola secara terpusat oleh instansi pemerintah di atasnya, kini desa mendapatkan anggaran yang cukup besar dan diberi kewenangan mengelola secara mandiri. Dengan adanya APBDesa yang begitu besar dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi calon kepala desa, untuk memaksimalkan dana tersebut demi kemajuan desa serta muncul peluang untuk menyalahgunakan dana tersebut. Untuk meminimalisir kecurangan yang muncul seiring dengan dana desa yang begitu besar perlu adanya transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, serta meminimalisir kecurangan saat proses pemilihan kepala desa. Hal ini sebagaimana wawancara berikut:

“Pada pendataan awal yang dilakukan KPU Kabupaten Gresik jumlah DPS di Kabupaten Gresik sebanyak 908.853 setelah dilakukan pendataan lanjutan terdapat sejumlah 7.175 data yang disinyalir merupakan data ganda dan harus ditinjaulanjuti supaya tidak disalahgunakan”

Dalam mengatasi permasalahan di atas Pemerintah Kabupaten Gresik membuat suatu terobosan dalam melakukan pendataan calon pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak yang telah dilaksanakan pada 29 Oktober 2017. Inovasi yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik yaitu E-Pilkades, yang dilaksanakan pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2017 tepatnya, dari 19 Desa yang melaksanakan pilkades serentak terdapat 5 desa yang akan melaksanakan pilkades berbasis elektronik, 5 desa tersebut adalah Desa Kepuhklagen di Kecamatan Wringinanom, Desa Tulung di Kecamatan Kedamean, Desa Dawuh di Kecamatan Sangkapura, Desa Panjunan dan Desa Kandangan di Kecamatan Duduk. Berdasarkan wawancara awal dengan Sriyanto, ST selaku kasi kerjasama dan inovasi pelayanan, diketahui bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dalam proses pemilihan kepala desa melalui sistem manual. Hal ini sebagaimana wawancara berikut:

“Adanya inovasi E-pilkades ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan adanya data pemilih yang ganda sehingga aman dari manipulasi pada pelaksanaan E-pilkades, pada pelaksanaannya panitia menggunakan data pemilih dari DPT dan mencocokkan dengan data rekam E-KTP dari desa tersebut sehingga akan diketahui orang-orang yang dapat melakukan pemilihan dengan sistem elektronik atau orang-orang yang sudah mempunyai E-KTP dan data tersebut akan dimasukkan dalam satu *server*, sedangkan masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP tetap bisa memilih dengan metode pemilihan secara manual dan akan dicatat secara manual”

Kedepannya diharapkan E-pilkades dapat dilaksanakan secara merata dan lebih disempurkan, karena menurut Bapak Karman salah satu warga Desa Panjunan menyatakan pada pelaksanaannya penggunaan alat sensor *finger print* membuat antrian panjang sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal senada yang juga diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Gresik Bapak Sambari Halim Radianto dalam situs [www.dispendukcapil.gresikkab.go.id](http://www.dispendukcapil.gresikkab.go.id) yang dipublikasikan pada tanggal 30 Oktober 2017 masih banyak kekurangan, namun ke depan pihaknya akan melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk kesempurnaannya. Terdapat sedikit kelemahan misalnya sensor *finger print* yang lambat mendeteksi. Hal ini karena jari pemilih yang berkeringat atau kotor. Namun hal ini tidak mengganggu karena secara manual para pemilih tersebut sudah terdapat dengan baik. Untuk mengantisipasi adanya gangguan listrik padam pada pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis elektronik ini panitia juga menyiapkan genset serta *UPS* sehingga ketika terjadi listrik padam data di dalam komputer tidak hilang.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa adanya E-Pilkades dapat memberikan pelayanan terbaik dalam proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Gresik. Serta sebagai pelayanan publik berbasis *e-government* yang baru dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Maka perlu mengeahui lebih lanjut bagaimana implementasi E-Pilkades dapat dijalankan sehingga perlu untuk melakukan penelitian yang lebih dalam melalui “Implementasi Elektronik Pemilihan Kepala Desa (E-Pilkades) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik (Studi di Desa Panjunan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik)”.

## METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori Indikator pengukuran aspek-aspek dalam mewujudkan implementasi *E-Government* menurut Rianto dan Lestari dalam bukunya Polri dan Aplikasi *E-Government* Dalam Pelayanan Publik (2012:43) yaitu *hardware*, *software*, *human resource* (SDM), data dan informasi, struktur organisasi, komunikasi, dan sikap pelaksana dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Elektronik Pemilihan Kepala Desa (E-Pilkades) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik (Studi di Desa Panjunan, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik) dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2011:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik berbasis *Electronic Government* yang diluncurkan oleh pemerintah saat ini bukan menjadi hal baru lagi, karena hal tersebut guna mengembangkan program layanan publik dan untuk mewujudkan program E-Pilkades yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Hal ini telah mendapat dukungan penuh oleh Bupati Kabupaten Gresik dalam meningkatkan efektifitas pelayanan publik berbasis *e-Government* serta dapat mendorong terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Gresik. Program E-Pilkades ini diimplementasikan dengan menggunakan beberapa alat, meliputi monitor *PC*, *CPU*, pendeteksi sidik jari, pendeteksi retina, *UPS*, dan genset adanya program E-Pilkades ini bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan data DPT yang ganda. Sehingga mewujudkan Pemilu yang aman, jujur dan adil. Program ini juga sangat efektif dan efisien karena proses verifikasi data calon pemilih dilakukan hanya dengan menempelkan jari ke alat *finger print scanner*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa layanan E-Pilkades merupakan program yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat dibidang pemilihan umum. Dalam implementasi layanan *e-Government* ini agar mendapat hasil yang diharapkan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 maka harus melihat aspek-aspek dalam implementasi *e-Government* untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43).

### 1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras komputer (*hardware*) merupakan hal utama untuk mewujudkan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena pada dasarnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terlepas dengan kebutuhan sumber daya perangkat keras komputer (*hardware*). Program pemilihan kepala desa berbasis elektronik adalah program dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan data ganda yang muncul. Program ini memanfaatkan data perekaman dari program E-KTP yang sudah

dilakukan sebelumnya. Penyediaan *hardware* di setiap desa bergantung pada banyaknya jumlah masyarakat yang ada di desa tersebut.

Pada Desa Panjunan sendiri menggunakan 1 set *hardware* yang meliputi monitor *PC*, *CPU*, pendeteksi sidik jari, pendeteksi retina, *UPS*, dan genset, alat-alat tersebut merupakan aset dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik pengadaanya menggunakan dana APBD sebesar 15.000.000,00, sehingga setelah penggunaan E-Pilkades alat-alat tersebut akan digunakan kembali oleh Dispendukcapil sebagai alat operasional. Pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan, terdapat sedikit kelemahan pada sensor pendeteksi sidik jari yang lambat mendeteksi. Hal ini karena jari pemilih yang berkeringat atau kotor, namun hal ini tidak mengganggu karena secara manual para pemilih tersebut sudah terdata dengan baik. Adanya program E-Pilkades yang ada di Desa Panjunan Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik ini mempunyai tujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan data ganda yang muncul dalam DPT. Namun pada pelaksanaannya memang masih banyak kendala terutama pada perangkat keras yang sulit membaca sidik jari pemilih dikarenakan mayoritas masyarakat di Desa Panjunan mempunyai mata pencaharian sebagai petani sehingga banyak dari masyarakat yang sidik jarinya sulit untuk dibaca karena memudar. Untuk pelaksanaan kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik harus bisa mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem *hardware* ini supaya dapat tercapai tujuan awal dilaksanakannya program E-Pilkades.

### 2. Perangkat Lunak (*Software*)

Sumber daya *E-Government* lainnya yang cukup penting adalah perangkat lunak komputer (*software*). Di mana *software* dibagi menjadi dua macam yaitu *software* operasi dan *software* aplikasi. *Software* yang ada tidak semuanya diciptakan oleh instansi yang berwenang, *software* yang ada juga harus memiliki ruang penyimpanan yang besar untuk memuat data yang ada dalam sebuah aplikasi dan untuk penjagaan *software* juga harus sangat diperhatikan karena untuk menghindari *hacker*. Kendala seperti bermasalahnya dalam mengakses website juga harus diperhatikan agar tidak terjadi. Fitur dalam aplikasi sebaiknya juga disajikan secara beragam, lengkap dan jelas guna memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi. Pada pelaksanaannya *Software* yang digunakan dalam program E-Pilkades

ini merupakan berjenis *software* aplikasi pada komputer, dalam hal ini yang membuat *software* adalah beberapa orang staff dari Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dpendukcapil Kabupaten Gresik. Selama pengembangan aplikasi ini juga konsultasi dengan kementerian, dan mendukung masalah koordinasi. Secara umum fungsi dari *software* ini adalah untuk memverifikasi data pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, jika pada pelaksanaan pemilu pada umumnya menggunakan kertas, pada program E-Pilkades ini proses verifikasi sudah menggunakan piranti elektronik.

Pelaksanaan program E-Pilkades di Kabupaten Gresik ini menggunakan sistem offline sehingga tidak ada antisipasi dari Dpendukcapi Kabupaten Gresik untuk mengatasi *hacker*. Antisipasi yang dilakukan oleh Dpendukcapil Kabupaten Gresik hanya untuk mengatasi jika terjadi listrik padam, dengan menggunakan genset dan *UPS*, penggunaa *UPS* ini digunakan saat terjadi listrik padam, dengan menggunakan *UPS* dapat memberikan daya selama 3 jam sehingga komputer tidak melakukan reset data. Pada pelaksanaan E-Pilkades tidak ada masalah berarti yang menghambat kerja *software*. Dalam prosesnya jika proses scanning dapat berjalan dengan lancar maka *software* akan dapat memunculkan data dengan cepat.

Sedangkan bentuk sumber dana yang digunakan untuk ketersediaan *software* sama dengan dana yang digunakan untuk ketersediaan *hardware* dalam aplikasi ini sepenuhnya dana dari APBD Kabupaten Gresik yaitu Rp. 15.000.000,00. Adanya sumber dana tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Sumber dana dari APBD tersebut tidak hanya digunakan untuk biaya pembelian *hardware* dan *software* saja, namun juga termasuk untuk biaya sosialisasi peluncuran program E-Pilkades dan untuk perawatan *hardware* dan *software* kedepannya.. Pengembangan program tersebut dimaksudkan untuk persiapan pelaksanaan E-Pilkades yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 pada 260 desa di Kabupaten Gresik. Dengan demikian adanya inovasi terbaru yang dikelola Dinas Kependudukan dan Caatatan Sipil Kabupaten Gresik ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terkait pelaksanaan Pilkades.

### 3. **Human Resources (SDM)**

SDM merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Ketersedian SDM yang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis teknologi

informasi dan komunikasi tentunya juga bersifat baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya harus cukup. Kebutuhan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) telah dipenuhi oleh Dpendukcapil Kabupaten Gresik. Pada pelaksanaan E-Pilkades Dpendukcapil Kabupaten Gresik menerjunkan 4-5 orang per desa untuk menjadi operator, walau dengan jumlah yang terbatas 4-5 orang per desa itu sudah cukup karena tim dari Dpendukcapil Kabupaten Gresik sudah paham dengan penggunaan alat pada program E-Pilkades. Sumber Daya Manusia yang disiapkan tidak sesuai latar belakang pendidikan yang seharusnya SDM yang ahli di bidang informatika, namun terlepas dari latar belakang pendidikan SDM yang disediakan pengelola program E-Pilkades merupakan orang-orang yang terpilih dan memenuhi kriteria serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional. SDM yang ada untuk pelaksana program E-Pilkades dinilai sudah cukup baik dan SDM yang ada telah melaksanakan tugas dengan baik untuk merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis elektronik tersebut. Untuk SDM mengambil dari Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dan dibantu beberapa orang dari bidang lain, untuk kedepannya Dpendukcapil Kabupaten Gresik akan menambah jumlah SDM, karena pelaksanaan E-Pilkades yang dilaksankn pada Oktober 2017 dinilai baik oleh pemerintah Kabupaten Gresik sehingga Dpendukcapil Kabupaten Gresik diberikan dukungan dari DPRD Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Pilkades berbasis elektronik atau E-Pilkades bahkan E-Voting di pemilihan kepala desa pada tahun 2019.

### 4. **Data dan Informasi**

Komponen sumber daya berikutnya adalah data dan informasi. Sumber daya ini sering kali kurang mendapatkan perhatian oleh implementor *E-Government*. Padahal kesediaan data masukan, baik dalam bentuk lembaran kertas maupun dalam bentuk digital (database) menjadi bahan utama proses *E-Government* guna mendukung tujuan penyebarluasan informasi. Dpendukcapil Kabupaten Gresik menyimpan data menggunakan *server* pada komputer, ada banyak data masyarakat yang di simpan dalam *server*. Terdapat sejumlah 7.175 data yang disinyalir merupakan data ganda, data tersebut terdeteksi saat dilakukan pendataan tingkat lanjut dari jumlah DPS yang berjumlah 908.853, pendataan tingkat lanjut dilakukan oleh Dpendukcapil Kabupaten Gresik bersama KPU Kabupaten Gresik, munculnya data ganda tersebut

dikarenakan masyarakat yang berpindah dan menetap di daerah lain sehingga muncul data yang ganda, namun masyarakat tidak perlu khawatir Dispendukcapil Kabupaten Gresik dengan program E-Pilkades dapat mengatasi permasalahan tersebut. Data masyarakat yang digunakan dalam pelaksanaan program E-Pilkades ini diperoleh dari data perekaman E-KTP yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, dengan menggunakan data dari perekaman E-KTP dapat diinformasikan bahwa data masyarakat yang muncul ketika pelaksanaan program E-Pilkades dipastikan sesuai. Hal itu merupakan bentuk bahwasanya data dan informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### **5. Struktur Organisasi**

Dari berbagai referensi menyatakan bahwa idealnya implementor *E-Government* adalah lembaga struktural yang berada satu tingkat di bawah top leader namun dalam implementasi program pelaksanaan E-Pilkades masih belum dibentuk struktur organisasi dan penentuan tupoksi dari setiap bidang. Struktur organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan E-Pilkades kemarin tidak mempunyai struktur organisasi sendiri, namun masih menggunakan struktur yang sesuai di Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Sehingga dapat dinilai masih belum cukup memadai dalam mengerjakan tupoksinya, namun kedepannya Dispendukcapil Kabupaten Gresik sudah mempunyai gambaran tentang struktur organisasi dalam pelaksanaan E-Pilkades yang akan dilaksanakan kembali pada tahun 2019. Diharapkan setelah dibentuk struktur organisasi pada pelaksanaan E-Pilkades pada tahun 2019 mendatang benar-benar dapat berjalan lancar guna menyelesaikan masalah dan dapat mencapai tujuan awal dilaksanakannya program E-Pilkades. Sedangkan untuk peran aktif struktur organisasi yang menangani proses pelaksanaan E-Pilkades cukup profesional, sehingga layanan administrasi ini dapat berproses lebih efektif dan efisien dan tentunya lebih paperless.

#### **6. Komunikasi**

Kebijakan *E-Government* adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi dalam implementasinya tersebar di seluruh komponen lembaga pemerintah termasuk institusi-institusi di daerah. Pemerintah pusat atau lembaga implementor utama di daerah berkewajiban mengalirkan berbagai informasi berkaitan dengan kebijakan *E-Government*.

Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan atau maksud yang dilakukan melalui suatu instansi yang berwenang kepada pihak lain yang menerima implementasi suatu kebijakan baik dilakukan secara langsung atau melalui media (surat, telepon, email, SMS dan lain sebagainya). Proses komunikasi dapat dikatakan berhasil mana kala para pelaksana memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam bidang *E-Government*. Dalam implementasi layanan Implementasi program E-Pilkades ini merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Dalam implementasinya Dispendukcapil Kabupaten Gresik berkewajiban mengalirkan berbagai informasi yang berkaitan dengan program E-Pilkades. Proses komunikasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten Gresik dengan masyarakat salah satunya yaitu sosialisasi yang bertujuan untuk membangun perspektif yang sama antara pihak Dispendukcapil Kabupaten Gresik dan masyarakat sebagai pengguna program E-Pilkades.

Proses sosialisasi yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Gresik dengan mengundang seluruh perangkat desa dari 5 desa yang melaksanakan Pilkades berbasis elektronik ke kantor Dispendukcapil Kabupaten Gresik, dengan memberikan materi bagaimana penggunaan alat untuk masalah efektifitas dan transparansi, untuk sosialisasi tahap dua melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan mendatangi setiap desa dan memberikan pemahaman ke masyarakat tentang cara penggunaan alat tersebut.

#### **7. Sikap Pelaksana**

Idealnya setiap program kebijakan direspon dengan baik oleh para pelaksana atau penggunanya. Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif, karena terkait dengan motivasi, kemauan atau niat. Apabila para pelaksana mengimplementasikan kebijakan *E-Government* secara konsisten maka respon positif. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik terkait pembuat program aplikasi E-Pilkades ini memiliki sikap yang dapat direspon baik oleh para pelaksananya atau oleh masyarakat sebagai penerima layanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik terutama Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan telah mengimplementasikan program E-Pilkades secara optimal dan konsisten. Karena, hal tersebut merupakan kewajiban, komitmen serta tanggung jawab Dispendukcapil Kabupaten Gresik atas memberikan layanan kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Sikap yang di berikan salah satunya dengan sistem pelayanan yang terbaik,

bagi tim di lapangan wajib bersikap *welcome* kepada masyarakat yang bertanya mengenai proses atau penggunaan alat E-Pilkades, ada juga masyarakat yang merasa tidak sabar menunggu karena prosesnya yang cukup memakan waktu sehingga antri panjang, jadi operator yang berada di lapangan juga harus bisa mengatasi hal tersebut. Namun juga terdapat respon negatif dari salah satu warga Desa Pajunan yang merasa proses pembacaan sidik jari masyarakat cukup lama, disisi lain untuk respon komputer supaya bisa memunculkan data dari *server* itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Oleh karena itu, adanya program E-Pilkades ini sedikit dinilai ribet dan kurang efektif.

## PENUTUP

### Simpulan

Hasil penelitian ini terkait dengan Implementasi Elektronik Pemilihan Kepala Desa (E-Pilkades) di Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik (Studi di Desa Panjuran Kecamatan Duduksampayan Kabupaten Gresik) sudah cukup baik. Pelayanan publik berbasis *Electronic Government* yang diluncurkan oleh pemerintah saat ini bukan menjadi hal baru lagi, karena hal tersebut guna mengembangkan program layanan publik dan untuk mewujudkan program E-Pilkades yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Hal ini telah mendapat dukungan penuh oleh Bupati Kabupaten Gresik dalam meningkatkan efektifitas pelayanan publik berbasis *e-Government* serta dapat mendorong terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Gresik. Program E-Pilkades ini diimplementasikan dengan menggunakan beberapa alat, meliputi monitor *PC*, *CPU*, pendeteksi sidik jari, pendeteksi retina, *UPS*, dan genset adanya program E-Pilkades ini bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan data DPT yang ganda. Sehingga mewujudkan Pemilu yang aman, jujur dan adil. Program ini juga sangat efektif dan efisien karena proses verifikasi data calon pemilih dilakukan hanya dengan menempelkan jari ke alat *finger print scanner*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa layanan E-Pilkades merupakan program yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat dibidang pemilihan umum. Dalam implementasi layanan *e-Government* ini agar mendapat hasil yang diharapkan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 maka harus melihat aspek-aspek dalam implementasi *e-Government* untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43).

Terdapat kesimpulan bahwa perangkat keras komputer (*hardware*) yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik masih kurang memadai dalam pengoperasian program E-Pilkades. Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai peranan penting dalam pembuatan inovasi

pelayanan E-Pilkades ini. Selanjutnya yakni *software* yang digunakan pada E-Pilkades yaitu *software* aplikasi pada komputer. Yang terlibat dalam pembuatan *software* aplikasi ini yaitu staff dari Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Untuk *server* yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik telah didukung dengan prosesor yang mumpuni dan 16 GB RAM. Pelaksanaan program E-Pilkades di Kabupaten Gresik ini menggunakan sistem offline sehingga tidak ada antisipasi dari Dispendukcapil Kabupaten Gresik untuk mengatasi *hacker*. Antisipasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten Gresik hanya untuk mengatasi jika terjadi listrik padam, dengan menggunakan genset dan *UPS*.

Faktor yang terpenting dalam mewujudkan implementasi layanan *E-Government* yaitu adanya sumber dana untuk *hardware* dan *software*. Sumber dana yang ada untuk menciptakan *hardware* dan *software* yaitu anggaran dari APBD sebesar Rp. 15.000.000,00. Kini Pemerintah Kabupaten Gresik mengembangkan layanannya yang berbasis *e-Government* yaitu berupa program E-Pilkades ini. Pengembangan program tersebut dimaksudkan untuk persiapan pelaksanaan E-Pilkades yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 pada 263 desa di Kabupaten Gresik

Sedangkan SDM yang ada untuk pelaksanaan E-Pilkades Dispendukcapil Kabupaten Gresik menerjunkan 4-5 orang per desa untuk menjadi operator, walau dengan jumlah yang terbatas 4-5 orang per desa itu sudah cukup karena tim dari Dispendukcapil Kabupaten Gresik sudah paham dengan penggunaan alat pada program E-Pilkades. Sumber Daya Manusia yang disiapkan tidak sesuai latar belakang pendidikan yang seharusnya SDM yang ahli di bidang informatika, namun terlepas dari latar belakang pendidikan SDM yang disediakan pengelola program E-Pilkades merupakan orang-orang yang terpilih dan memenuhi kriteria serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional. SDM yang ada untuk pelaksana program E-Pilkades dinilai sudah cukup baik dan SDM yang ada telah melaksanakan tugas dengan baik untuk merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis elektronik tersebut.

Indikator kelima yang juga ikut menentukan terwujudnya layanan E-Pilkades adalah struktur organisasinya. Struktur Organisasi yang ada untuk melaksanakan program inovasi pelayanan diambil dari Struktur organisasi yang digunakan di Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Sehingga dapat dinilai masih belum cukup memadai dalam mengerjakan tupoksinya, namun kedepannya Dispendukcapil Kabupaten Gresik sudah mempunyai gambaran tentang struktur organisasi dalam pelaksanaan E-Pilkades yang akan dilaksanakan kembali pada tahun 2019. Sedangkan untuk peran aktif struktur organisasi yang menangani proses pelaksanaan E-Pilkades cukup profesional, sehingga layanan administrasi ini dapat berproses lebih efektif dan efisien dan tentunya lebih *paperless*.

Proses komunikasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten Gresik dengan masyarakat salah satunya yaitu sosialisasi yang bertujuan untuk membangun perspektif yang sama antara pihak

Dispendukcapil Kabupaten Gresik dan masyarakat sebagai pengguna program E-Pilkades. Proses sosialisasi yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Gresik dengan mengundang seluruh perangkat desa dari 5 desa yang melaksanakan Pilkades berbasis elektronik ke kantor Dispendukcapil Kabupaten Gresik, dengan memberikan materi bagaimana penggunaan alat untuk masalah efektifitas dan transparansi, untuk sosialisasi tahap dua melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan mendatangi setiap desa dan memberikan pemahaman ke masyarakat tentang cara penggunaan alat tersebut.

Indikator terakhir yang tidak kalah penting dalam mewujudkan implementasi layanan E-Pilkades yaitu bagaimana sikap pelaksana implementasinya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik terutama Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan telah mengimplementasikan program E-Pilkades secara optimal dan konsisten. Karena, hal tersebut merupakan kewajiban, komitmen serta tanggung jawab Dispendukcapil Kabupaten Gresik atas memberikan layanan kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Sikap yang di berikan salah satunya dengan sistem pelayanan yang terbaik, bagi tim di lapangan wajib bersikap welcome kepada masyarakat yang bertanya mengenai proses atau penggunaan alat E-Pilkades, ada juga masyarakat yang merasa tidak sabar menunggu karena prosesnya yang cukup memakan waktu sehingga antri panjang, jadi operator yang berada di lapangan juga harus bisa mengatasi hal tersebut. Namun juga terdapat respon negatif dari salah satu warga Desa Pajunan yang merasa proses pembacaan sidik jari masyarakat cukup lama, disisi lain untuk respon komputer supaya bisa memunculkan data dari server itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Oleh karena itu, adanya program E-Pilkades ini sedikit dinilai ribet dan kurang efektif. Namun selebihnya sikap pelaksana atau implementasinya dinilai sudah cukup optimal dan professional.

### Saran

Berikut adalah beberapa saran dalam Implementasi Elektronik Pemilihan Kepala Desa (E-Pilkades) di Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik (Studi di Desa Panjuran Kecamatan Duduksampayan Kabupaten Gresik):

1. Bagi Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Gresik, sebaiknya mengembangkan lagi program E-Pilkades dengan menambahkan berbagai fitur yang dapat mempermudah dan mempercepat proses scanning pada sidik jari.
2. Bagi Dispendukcapil Kabupaten Gresik, sebaiknya lebih memberikan pendidikan dan pelatihan khusus untuk SDM yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan dan tupoksinya agar pelayanan publik berbasis *e-Government* dapat berjalan lebih baik.
3. Bagi Dispendukcapil Kabupaten Gresik, sebaiknya membentuk sebuah struktur organisasi untuk pelaksanaan E-Pilkades yang akan datang sehingga lebih jelas dalam pembagian tupoksi di setiap posisi.

4. Bagi Dispendukcapil Kabupaten Gresik, sebaiknya dapat mengatasi munculnya data pemilih yang ganda supaya tidak muncul permasalahan terkait data ganda dalam pelaksanaan pemilu.
5. Bagi Dispendukcapil Kabupaten Gresik, sebaiknya memberikan dasar hukum untuk masalah pendanaan untuk pengadaan *hardware* dan *ha* karena secara hukum Dispendukcapil tidak masuk dalam susunan organisasi pelaksanaan pilkades.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA,
- b. Fitrotun Niswah, S.AP selaku dosen pembimbing
- c. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. dan Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si selaku dosen penguji,
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi dan Narbuko. 2009. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bangin M. Burhan. 2007. Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya, Ed. I Cet I, Jakarta: Prenada Media Grub.
- Budi Rianto, Drs., M.Si dan Tri Lestari, M.Si. 2012. Polri dan Aplikasi Egovernment dalam Pelayanan Publik. Surabaya: Putra Media Nusantara..
- Dwiyanto, Agus. 2011. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta” Gadjah Mada Press.
- Ha, Huong. 2013. *E-Government* in Singapore: Critical Success Factors. *E-Government Success around the World: Cases, Empirical Studies, and Practical Recommendations* Page 22. Diakses 19 Oktober 2017
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government*, Strategi pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Indrajit, Richardus Eko dkk. 2005. *E-Government* in Action: Ragam Kasus Implementasi di Berbagai Belahan Dunia. Yogyakarta: Andi.
- Made,Leita Anistiawati 2014. “Implementasi Kebijakan Penerapan Elektornik Voting (E-Voting)

Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)". Skripsi. Universitas Udayana

- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (2007). Analisis Data Kualitatif, buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press. O'Brien James A. 2005. Pengantar Sistem Informasi: Perspektif Bisnis dan Manajerial. Edisi 12. Jakarta(ID): Salemba Empat.
- Nurul Wahida Safitri 2016. "Penerapan *E-Government* di Pusat Pelayanan Informasi dan Pangaduan Kabupaten Pinrang". Skripsi. Universitas Hasanuddin
- Ratminto & Winarsih, Atik Septi. 2006. Manajemen Pelayanan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rianto, Budi. Ec .L. Tri Lestari. 2012. Polri & Aplikasi E-Governmnet dalam Pelayanan Publik. Surabaya. CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Rokhman, Ali 2008. Potret dan Hambatan *e-Government* di Indonesia. Inovasi Online, Edisi vol 11/XX, Juli 2008.
- Salusu, Jonathan. 2003. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit Cetakan Ke-enam. Jakarta : PT. Grasindo.
- Sinambela, L.P. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Cetakan kelima. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Bandung: PT. Refika Aditama
- Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu PolitikIndonesia).
- Website resmi JIPP Propinsi Jawa Timur [http://jipp.jatimprov.go.id/?page=berita\\_detail&id=20](http://jipp.jatimprov.go.id/?page=berita_detail&id=20) Diakses pada tanggal 5 Februari 2018 Pukul: 11.45WIB
- Website resmi Dispendukcapil Kabupaten Gresik <http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/kpu-dan-komisi-ii-dpr-ri-puji-pilkades-serentak-berbasis-dan-data-kependudukan/> Diakses pada tanggal 5 Februari 2018 Pukul: 12.10WIB
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.